

PERKARA PENTING PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2025, Perseroan menghadapi 1 (satu) perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) dan tidak menghadapi perkara pidana. Perseroan terus melakukan pengelolaan dan penyelesaian setiap perkara hukum sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan. Selain itu, tidak terdapat permasalahan hukum yang melibatkan anggota Dewan Komisaris maupun Direksi yang sedang menjabat, baik dalam perkara perdata maupun pidana.

[DOKUMEN SELENGKAPNYA →](#)

Perkara Penting

Significant Matters

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Permasalahan dan/atau perkara hukum yang dihadapi Perusahaan sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

LEGAL CASES FACED BY THE COMPANY

The issues and/or legal cases faced by the Company during 2025 are as follows:

Permasalahan Hukum Legal Issues	2025		2024		2023	
	Perdata Civil Cases	Pidana Criminal Cases	Perdata Civil Cases	Pidana Criminal Cases	Perdata Civil Cases	Pidana Criminal Cases
Selesai dan/ atau Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Resolved and/or Having Permanent Legal Force	1	-	1	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian In Process of Resolution	0	-	1	-	2	-
Jumlah Keseluruhan Total Number	1	-	2	-	2	-

Pokok Perkara/ Gugatan Case Subject / lawsuit		Status Penyelesaian Perkara/Gugatan Status of Case/ lawsuit		Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company's Condition	Upaya Manajemen Management Efforts	Sanksi yang Dikenakan Sanctions Imposed	Nominal Tuntutan Ganti Rugi Claimed Damages Amount
Perkara No. 357/PDT/2024/PT DKI	Perdata Civil Case No. 357/PDT/2024/PT DKI	Inkracht posisi	dengan menang	Tidak ada None	Danareksa telah menempuh negosiasi pada proses mediasi dan pada proses persidangan tingkat pertama dan banding menggunakan sumber daya dari Danareksa PT Danareksa (Persero) has undertaken negotiations during the mediation process and throughout the trial proceedings at both the first-instance and appeal levels, utilizing internal resources of Danareksa in handling the case.	Tidak ada None	Tidak ada None

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH ENTITAS ANAK

LEGAL CASES FACED BY SUBSIDIARIES

Permasalahan Hukum Legal Issue	2025	
	Perdata Civil Cases	Pidana Criminal Cases
Selesai dan/atau Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Resolved and/or Having Permanent Legal Force	5	-
Dalam Proses Penyelesaian In Process of Resolution	17	-
Jumlah Keseluruhan Total Number	22	-

PT Danareksa Finance

Pokok Perkara/Gugatan Case Subject /Lawsuit	Status Penyelesaian Perkara/Gugatan Status of Case/Lawsuit	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company's Condition
Perkara Perdata No. 7/Pdt.G/2021/ PN Sby Civil Case No. 7/Pdt.G/2021/PN Sby	Telah dilakukan eksekusi berupa tanah di Tanjung Benoa, Bali dengan nilai Rp3,5M. Sisa penyelesaian dipertimbangkan untuk melakukan eksekusi jaminan di Malang. Execution has been carried out in the form of land located in Tanjung Benoa, Bali with a value of IDR 3.5 billion. The remaining settlement is being considered for execution of collateral in Malang.	Tidak ada None

PT Kawasan Industri Medan

Pokok Perkara/Gugatan Case Subject /Lawsuit	Status Penyelesaian Perkara/Gugatan Status of Case/Lawsuit	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company's Condition
Perkara Perdata No. 701/ Pdt.G/2019/PN.Mdn Civil Case No. 701/Pdt.G/2019/ PN.Mdn	Saat ini, salinan Penetapan Sita Eksekusi sudah diterima oleh kuasa hukum PT KIM. Tindakan selanjutnya adalah melakukan pencarian aset atas nama Sdr. Toga Damanik. Currently, a copy of the Execution Seizure Order has been received by the legal counsel of PT KIM. The next action is to conduct an asset search under the name of Mr. Toga Damanik.	Tidak ada None
Perkara Perdata No. 729/ Pdt.G/2025/PN Mdn Civil Case No. 729/Pdt.G/2025/ PN Mdn	Dalam proses persidangan pada pengadilan tingkat pertama. The case is currently in the trial process at the court of first instance.	Tidak ada None

Kawasan Industri Wijayakusuma

Pokok Perkara/Gugatan Case Subject /Lawsuit	Status Penyelesaian Perkara/Gugatan Status of Case/Lawsuit	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company's Condition
Perkara Perdata No. 474/ Pdt.G/2025/PN Smg Civil Case No. 474/Pdt.G/2025/ PN Smg	Dalam proses persidangan pada pengadilan tingkat pertama. The case is currently in the trial process at the court of first instance.	Tidak ada None

PT Kawasan Industri Makassar

Pokok Perkara/Gugatan Case Subject / lawsuit	Status Penyelesaian Perkara/Gugatan Status of Case/Lawsuit	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company's Condition
Perkara Perdata No. 285/ Pdt.G/2024/PN.Mks Civil Case No. 285/Pdt.G/2024/ PN Mks	Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Makassar diterima oleh PT Kawasan Industri Makassar tanggal 2 Juli 2025, yang amar putusannya antara lain: 1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar (Tingkat I) (yang memenangkan PT Haripin Putra); 2. Menolak gugatan Penggugat (PT Haripin Putra – Terbanding); 3. Menghukum dan memerintahkan PT Haripin Putra untuk mengembalikan tanah industri yang dimanfaatkan dan dikuasai oleh PT Haripin Putra kepada PT KIMA dalam keadaan kosong, bersih seperti keadaan semula setelah HGB berakhir pada tanggal 24 September 2025. The appeal decision from the Makassar High Court was received by PT Kawasan Industri Makassar (PT KIMA) on 2 July 2025, with the ruling, among others, as follows: 1. Annulled the decision of the Makassar District Court (First Instance), which had ruled in favor of PT Haripin Putra; 2. Rejected the plaintiff's claim (PT Haripin Putra – Appellee); 3. Ordered and instructed PT Haripin Putra to return the industrial land utilized and controlled by the company to PT Kawasan Industri Makassar (PT KIMA) in an empty and clean condition, as it was originally, after the HGB (Building Use Rights) expires on 24 September 2025.	Tidak ada None

PT Kawasan Industri Makassar

Pokok Perkara/Gugatan Case Subject / lawsuit	Status Penyelesaian Perkara/Gugatan Status of Case/Lawsuit	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company's Condition
Perkara Perdata No. 187/ Pdt.G/2025/PN. Mks. Civil Case No. 187/Pdt.G/2025/PN Mk	Dalam proses persidangan pada pengadilan tingkat pertama. The case is currently in the trial process at the court of first instance.	Tidak ada None
Perkara Perdata No. 89/ Pdt.G/2025/PN.Mks Civil Case No. 89/Pdt.G/2025/PN Mks	Dalam proses persidangan pada pengadilan tingkat pertama. The case is currently in the trial process at the court of first instance.	Tidak ada None
Perkara Perdata No. 208/ PDT/2025/PT MKS Civil Case No. 208/PDT/2025/PT MKS	Dalam proses persidangan pada pengadilan tingkat pertama. The case is currently in the trial process at the court of first instance.	Tidak ada None

PT Perusahaan Pengelola Aset

Pokok Perkara/Gugatan Case Subject /Lawsuit	Status Penyelesaian Perkara/Gugatan Status of Case/Lawsuit	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company's Condition
Perkara Perdata No. 4885 K/ Pdt/2024 Civil Case No. 4885 K/Pdt/2024	Putusan Kasasi Cassation Decision	Tidak ada None
Perkara Perdata No. 1072/ Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt Civil Case No. 1072/Pdt.G/2024/ PN Jkt Brt	Dalam proses persidangan pada pengadilan tingkat pertama. The case is currently in the trial process at the court of first instance.	Tidak ada None
Perkara Perdata No. 1016/ Pdt.G/2024/PA.JS Pdt.G/2025/PA.JS Civil Case No. 1016/Pdt.G/2024/ PA.JS and No. 403/Pdt.G/2025/ PA.JS	Pada Nomor Perkara 1016/Pdt.G/2024/PA.JS Majelis Hakim memutuskan bahwa Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima / di tolak oleh Pengadilan. Pada Nomor Perkara 403/Pdt.G/2025/PA.JS, dalam proses persidangan pada pengadilan tingkat pertama. In Case No. 1016/Pdt.G/2024/PA.JS, the Panel of Judges ruled that the plaintiff's claim was inadmissible / rejected by the Court. In Case No. 403/Pdt.G/2025/PA.JS, the matter is currently in the trial process at the court of first instance.	Tidak ada None
PPA sebagai Turut Tergugat I atas gugatan PT Sinarmas Multi Finance (terkait debitur ex-BPPN), di mana Satgas BLBI melakukan Pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum ("SABH") milik Penggugat karena Penggugat dituduh mempunyai hutang kepada Bank Surya yang telah dilikuidasi, Penggugat mendalilkan tidak pernah menerima pencairan apa pun dari Bank Surya PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) acted as Co-Defendant I in a lawsuit filed by PT Sinarmas Multi Finance (related to an ex-BPPN debtor case), in which the Task Force for BLBI (Satgas BLBI) carried out a blocking of access to the Legal Entity Administration System (SABH) belonging to the Plaintiff due to allegations that the Plaintiff had outstanding obligations to Bank Surya, which had been liquidated. The Plaintiff argued that it had never received any disbursement or financing from Bank Surya.	Dalam proses persidangan pada pengadilan tingkat pertama. The case is currently in the trial process at the court of first instance	Tidak ada None

PT Perusahaan Pengelola Aset

Pokok Perkara/Gugatan Case Subject /Lawsuit	Status Penyelesaian Perkara/Gugatan Status of Case/Lawsuit	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company's Condition
PT PPA sebagai Turut Tergugat II atas gugatan dari CV Delima Jaya (terkait debitur ex-BPPN). Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara CV Delima Jaya dengan Multi Trade Development, Ltd, untuk memberikan Ganti Kerugian sebagaimana Putusan No. 12/Pdt.G/2023/PN Bgr dan menuntut untuk menghapuskan perikatan serta menghapuskan Hak Tanggungan dalam Sertifikat Hak Milik CV Delima Jaya. PPA diminta menjalankan isi putusan, namun penguasaan jaminan tidak di PPA dan utang-piutang juga tidak di PPA karena telah ada pengalihan piutang dari BPPN ke Multi Trade Development, Ltd PT PPA acted as Co-Defendant II in a lawsuit filed by CV Delima Jaya (related to an ex-BPPN debtor). The unlawful act lawsuit between CV Delima Jaya and Multi Trade Development, Ltd. sought compensation as stipulated in Decision No. 12/Pdt.G/2023/PN Bgr, as well as the cancellation of the agreement and the removal of the mortgage right (Hak Tanggungan) attached to the land ownership certificate of CV Delima Jaya. PPA was requested to comply with the court decision; however, the collateral is not under PPA's control, and the receivables are also no longer under PPA, as the receivables had previously been transferred from BPPN to Multi Trade Development, Ltd.	Dalam proses persidangan pada pengadilan tingkat pertama. The case is currently in the trial process at the court of first instance	Tidak ada None

PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung

Pokok Perkara/Gugatan Case Subject/Lawsuit	Status Penyelesaian Perkara/Gugatan Status of Case/Lawsuit	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company's Condition
Perkara Perdata No. 191/ Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim Civil Case No. 191/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Tim	Putusan Pengadilan tingkat pertama First Instance Court Decision	Tidak ada None
Perkara Perdata No. 720/ Pdt.G/2023/PN.Jakt.Tim Civil Case No. 720/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Tim	Proses Kasasi Cassation Process	Tidak ada None
Perkara Perdata No. No.84/ Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim Civil Case No. 84/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Tim	Proses Kasasi Cassation Process	Tidak ada None
Perkara Perdata No. 846/ Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr Civil Case No. 846/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Utr	Dalam proses persidangan pada pengadilan tingkat pertama. Currently in the trial process at the court of first instance	Tidak ada None

PT Surabaya Industrial Estate Rungkut

Pokok Perkara/Gugatan Case Subject /Lawsuit			Status Penyelesaian Perkara/Gugatan Status of Case/Lawsuit	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company's Condition
Perkara Perdata No. 1223/Pdt.G/2024/PN Sby Civil Case No. 1223/Pdt.G/2024/PN Sby			Dalam proses persidangan pada pengadilan tingkat pertama. The case is currently in the trial process at the court of first instance	Tidak ada None

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT

Selama periode tahun 2025, tidak ada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perusahaan yang sedang menjabat, memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

LEGAL CASES INVOLVING SERVING MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

During the 2025 period, none of the currently serving members of the Board of Commissioners or the Board of Directors of the Company have any ongoing legal issues, whether civil or criminal.

Sanksi Administratif

Administrative Sanction

Pada tahun 2025, tidak terdapat sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.

In 2025, there were no administrative sanctions imposed on the Company, nor on members of the Board of Commissioners or Board of Directors, by the Financial Services Authority (OJK) or any other regulatory authorities.